

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang saat ini dikenal dengan negara maju yang mampu bersaing dengan negara – negara barat dan bahkan Jepang mampu memberikan pengaruhnya terhadap dunia internasional. Namun sebelum menjadi seperti sekarang ini, dulu Jepang adalah negara yang terisolasi dari dunia luar, Jepang kehilangan kontak dengan negara – negara luar hampir selama kurang lebih dua abad. Hingga setelah Jepang mulai menyadari bahwa Jepang adalah negara yang tertinggal, Jepang mulai membuka diri dan mau untuk menerima pengaruh pengaruh dari luar, tidak butuh waktu lama bagi Jepang dalam mempelajari pengaruh – pengaruh dari luar, dan hal tersebut mampu memberikan dampak yang baik bagi Jepang, dan mampu membawa Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang mampu meniru bangsa Eropa baik dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan bahkan militer.

Karena kemajuan Jepang tersebut pada akhirnya membawa Jepang untuk terlibat dalam Perang Dunia I. Dan keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia I, berhasil membawa Jepang untuk menjadi salah satu negara pemenang dari Perang Dunia I. Sehingga kemenangan Jepang dalam Perang Dunia I tersebut, membawa Jepang untuk kembali ikut dalam Perang Dunia II, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dialami Jepang pada Perang Dunia I, pada Perang Dunia II ini Jepang mengalami kekalahan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dua kota terpenting Jepang di bom atom oleh Sekutu yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Dimana Hiroshima dan juga Nagasaki merupakan kota industri terbesar yang ada di Jepang. (Firdaus, 2014)

Perang Dunia II diakhiri dengan rangkaian kekalahan Jepang yang berujung pada pendudukan Amerika Serikat di Jepang. Pasca berakhirnya okupasi Amerika Serikat di Jepang, hubungan kedua negara tetap terjalin dan saling berusaha mengurangi tensi. Bersamaan dengan keluarnya SCAP dari Jepang, kedua negara melakukan kesepakatan yang menjadi cikal bakal kerjasama bilateral dibidang keamanan. Melalui kerjasama bilateral yang disepakati, lahirlah sebuah aliansi kuat antara Jepang dan Amerika Serikat. Pada 8 September 1951, antara Jepang dan Amerika Serikat menyepakati dua perjanjian yakni San Fransisco Treaty dan Japan-US *Security Treaty*.

Sejarah terbentuknya kerja sama militer antara Jepang – Amerika Serikat dimulai setelah Jepang telah menyerah kepada sekutu, Jepang menyerah setelah dua kota pusat industri Jepang diluluh lantakkan oleh sekutu, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup Jepang. Dan karena kekalahan Jepang tersebut, membuat Jepang harus memenuhi tuntutan – tuntutan dari para pemenang Perang Dunia II, yaitu Jepang harus berada dibawah kendali Amerika Serikat melalui pemerintahan sementara SCAP (*Supreme Commander Alliance on Pacific*) dibawah perwakilan Jendral Douglas MacArthur.

Dan pada tanggal 8 September 1951 Jepang bersedia untuk menandatangani Perjanjian San Fransisco (*Threaty of San Fransisco*) di mana pada perjanjian tersebut ditandatangani oleh 49 negara, dan pada perjanjian tersebut berisi pernyataan secara resmi berakhirnya Perang Dunia II, dan mengakhiri kedudukan Jepang sebagai kekuatan imperialis. (Hara, 2001)

Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa kepulauan Jepang berada dibawah pengawasan Amerika Serikat. Dimana angkatan bersenjata Jepang dibubarkan dan Jepang juga tidak diperbolehkan untuk berperang dan

membangun angkatan bersenjata untuk berperang. Kebijakan – kebijakan nasional pertahanan Jepang lainnya seperti memajukan kebijakan pertahanan eksklusif, Jepang tidak diperbolehkan memiliki militer yang dapat mengancam dunia, Jepang tidak diperbolehkan untuk mengembangkan senjata nuklir, mengintensifkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat serta membangun kapabilitas defensif dalam batas-batas tertentu. Sebelum perjanjian San Fransisco ada dan disetujui di tahun 1947 ada konstitusi Jepang (Konstitusi Damai) Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu seusai Perang Dunia II.

Pasal 9 dalam Konstitusi 1947 dijelaskan bahwa adanya pelarangan terhadap argresi dan menolak semua kekuatan militer. Implikasinya adalah bahwa pertahanan Jepang tidak memiliki unsur militeristik dan tidak diizinkan untuk membentuk militer apapun meskipun industri Jepang mampu mengembangkannya. Dengan adanya hasil dari perjanjian San Fransisco di tahun 1951 yang juga mengacu pada konstitusi 1947 otomatis Amerika Serikat memiliki kontribusi besar dalam bidang pertahanan Jepang dan menjalin aliansi bagi kedua negara. (Jain, 2000)

Maka karena alasan – alasan tersebut membuat Jepang tidak dapat memiliki kekuatan militer yang sempurna, karena militer Jepang harus berada di bawah bayang – bayang Amerika Serikat dan mau tidak mau juga membuat Jepang harus selalu bergantung pada Amerika Serikat, karena salah satu tujuan dari aliansi yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat harus melindungi atau bahkan menjadi bagi payung bagi Jepang terutama dalam hal keamanan Jepang.

Menjadi negara maju tidak lantas membuat Jepang menjadi negara yang aman – aman dan bisa hidup secara damai tanpa ada permasalahan. Namun berbagai ancaman bisa muncul darimana saja, termasuk dari negara – negara disekitar

Jepang seperti Korea Utara dan China. Dan disisi lain sistem keamanan Jepang atau militer Jepang bisa dikatakan tidak bisa bekerja dengan sempurna karena Jepang sendiri keamanannya berada dibawah bayang – bayang Amerika Serikat, sehingga jika terjadi sesuatu pada Jepang, maka mau tidak mau Jepang harus meminta bantuan pada Amerika Serikat.

Berada diwilayah yang strategis menyebabkan Jepang berada pada posisi tidak bisa lepas dari adanya ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu seperti halnya ancaman nuklir dari Korea Utara ataupun dinamika konflik dari Laut China Selatan. Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara pihak akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di kawasan yang dapat berujung pada konflik terbuka. Pada dasarnya situasi di Laut China Selatan sekarang ini tidak stabil bahkan kawasan ini telah menjadi ajang perebutan wilayah oleh beberapa negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Kawasan ini pada dasarnya memiliki topografi dan potensi yang sangat krusial bagi negara-negara pantai di Laut China Selatan. Sehingga dari topografi dan potensi tersebut, kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang sangat sensitif dan memicu sebuah konflik.

Di sisi lain, Korea Utara dalam kesempatan yang berbeda meyakinkan bahwa Korea Utara mengembangkan nuklir hanya untuk menginginkan jaminan keamanan dari adanya kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara aliansinya di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Karena dampak dari program nuklir Korea Utara tersebut membuat beberapa negara di kawasan Asia Timur mulai mengantisipasi terhadap hal-hal yang dapat merugikan Negaranya khususnya Jepang dan Korea Selatan, kekhawatiran ini sangat beralasan karena dampak dari meningkatnya program nuklir Korea Utara semakin meningkatkan intensitas konflik lama antara Korea Utara dan Korea Selatan . Hal ini sesuai dengan pandangan Jepang tentang kondisi di kawasan Asia Timur pasca berakhirnya

perang dingin, seperti pecahnya Korea menjadi dua menjadi Korea Utara dan Korea Selatan yang saling bermusuhan dan terus meningkatkan kekuatan militernya. Perilaku Korea Utara yang semakin sulit untuk diprediksi oleh perhitungan normal akibat terisolirnya Negara tersebut. Keadaan ini membawa Jepang harus menghadapi masalah penculikan warganya oleh Korea Utara serta mengantisipasi program nulis Korea Utara.

Presiden Kim Jong-un dalam pernyataan menyambut tahun baru 2017, menegaskan keinginannya untuk berupaya memperkuat kapabilitas militer negaranya, pernyataannya tersebut adalah :

"We Should channel our efforts into increasing the nation's defense capability to cope with the aggressive provocations of the enemy. We should implement the policy of turning the entire army into an army of cadres. modernizing the whole army. arming all the people and fortifying the whole country, thereby strengthening the revolutionary armed force and further solidifying the all-people defense system".

(Kita harus berupaya bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional untuk menangkal provokasi-provokasi agresif dari negara musuh. Kita harus dapat mengimplementasikan kebijakan mengenai kaderisasi tentara, modernisasi persenjataan, mempersenjatai seluruh rakyat dan memperkuat pertahanan di berbagai pelosok negara, dengan demikian kita dapat memiliki angkatan bersenjata yang lebih kuat dan memiliki sistem pertahanan rakyat yang lebih solid) (Kusnendar, 2017)

Peningkatan kapabilitas militer Korut merupakan salah satu kebijakan dan strategi militer yang diambil pemerintah Korut menghadapi isolasi dunia internasional terhadap Korut. Diharapkan dengan peningkatan kapabilitas militer tersebut Korut dapat memiliki posisi yang cukup kuat dalam mempertahankan keamanan dalam negerinya dari tekanan-tekanan dunia internasional. Disamping itu dengan peningkatan kapabilitas militernya Korut mampu membuktikan kepada dunia luar bahwa Korut memiliki kekuatan dan kemampuan militer yang kuat yang dapat menjadi ancaman berbahaya bagi negara-negara yang memusuhinya. Menyikapi uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara setelah sukses mengembangkan rudalnya yaitu *Taepo Dong I*, Jepang memberikan indikasi akan meningkatkan kerja sama Jepang-AS untuk membangun sistem keamanan yang diberi nama *Theatre Missile Defence* (TMD). Rencana TMD diajukan pemerintah AS pada 1993 untuk menghadapi ancaman rudal jarak menengah yang dikembangkan Irak dan Korut. Inti sistem ini adalah penggunaan perangkat keras teknologi mutakhir, seperti satelit mata-mata dan rudal penyergap. (Kusnendar, 2017)

Kerjasama Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang tersebut diarahkan untuk menekan Korea Utara secara politis, sehingga Korea Utara dapat memenuhi keinginan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Timur guna menghentikan program pengembangan nuklir dan mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan dalam CTBT dan NPT, sekalipun Korea Utara telah keluar dari perjanjian NPT sebagai bentuk perlawanan Korea Utara dari tekanan internasional. Kekhawatiran Jepang atas program nuklir Korea Utara juga tidak terlepas dari pengalaman traumatik Jepang atas kehancuran Jepang pada Perang Dunia ke II, dimana Jepang mengalami kehancuran total secara fisik, bencana kemanusiaan, runtuhnya roda perekonomian serta polusi kimia nuklir yang masih terasa sampai saat ini, selain faktor traumatik tersebut, Jepang juga terikat dengan konstitusi

yang isinya memuat pembatasan militer Jepang pasca berakhirnya Perang Dunia II. Berdasarkan konstitusi (pasal 9), secara resmi Jepang dilarang memiliki kekuatan militer, karena perlindungan keamanannya berada dibawah naungan Amerika Serikat terutama yang berkaitan dengan invansi dari luar. Jepang juga dilarang memiliki atau menggunakan nuklir sebagai mesin perang.

Seperti diketahui, Korea utara mulai aktif menguji cobakan nuklirnya pada tahun 2002, dan sampai tahun 2017 tercatat enam kali Korea Utara menguji cobakan Nuklirnya. Dimana pada tahun 2017 dianggap sebagai uji coba nuklir yang paling dahsyat, Korea Utara kembali menembakkan rudal ke arah timur melewati wilayah udara Hokkaido, Jepang utara dan jatuh di Samudera Pasifik. Sebelumnya, rudal jarak menengah Hwasong-12, juga ditembakkan oleh Korea Utara melewati Jepang. Rudal terbang melintasi wilayah udara Jepang dan jatuh di Samudera Pasifik hingga memicu kepanikan warga di Jepang utara, pada 3 September 2017. (Yasinta, Kompas, 2018).

Pemerintah Jepang bahkan menghimbau kepada masyarakatnya untuk mencari perlindungan. Maka hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu ancaman bagi Jepang. Bahkan tidak hanya Jepang saja negara – negara lain pun mengecam tindakan dari Korea Utara tersebut. Berbagai protes juga dilayangkan kepada Korea Utara, namun disini negara yang paling merasa dirugikan adalah Jepang dimana Jepang merupakan negara yang masih satu kawasan dengan Korea Utara. Atas tindakan dari Korea Utara tersebut berbagai sanksi juga telah diberikan kepada Korea Utara. Namun hal tersebut hanya bersifat sementara dan kembali dilakukan oleh Korea Utara. (bbc, 2017)

Jepang menyatakan bahwa senjata nuklir dan rudal Korea Utara (Korut) masih tetap menjadi ancaman yang serius dan nyata bagi keamanan Jepang. Bahkan Korut juga secara

signifikan merusak perdamaian dan keamanan kawasan dan komunitas internasional. Hal tersebut disampaikan dalam tinjauan pertahanan tahunan Jepang yang baru saja dirilis. Ini merupakan tinjauan tahunan pertama sejak mencairnya ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam tinjauan tahun 2018 tersebut juga disorot mengenai kebangkitan China sebagai kekuatan militer. Disebutkan bahwa Beijing telah memicu "kekhawatiran keamanan yang kuat di wilayah dan komunitas internasional, termasuk Jepang". (hutapea, 2018)

Jepang menganggap Korea Utara sebagai ancaman bagi keamanannya. Meski Korea Utara sudah menghentikan uji peluru kendali dan nuklirnya, nyatanya mereka masih melakukan kegiatan militer di Semenanjung Korea, yang dianggap membahayakan Jepang. Bahkan Jepang beranggapan bahwa kegiatan militer yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan ancaman yang sangat serius serta sangat menekan Jepang. Ancaman tersebut bersifat nyata bagi Jepang, sehingga Jepang dengan Amerika Serikat semakin memperkuat aliansinya untuk mencegah Korea Utara agar tidak bertindak semauanya sendiri. Bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim sejumlah kapal perangnya ke Jepang untuk mengantisipasi rencana uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, dan kapal – kapal yang dikirimkan oleh Amerika tersebut sengaja mengitari semenanjung Korea. Sehingga kerja sama militer antara Jepang dan Amerika Serikat semakin menguat dimana Amerika Serikat dan juga Jepang juga berusaha untuk menekan Korea Utara agar tidak bertindak dengan apa yang mereka mau terutama terkait nuklir dan rudalnya. (Setiawan, 2017)

Pada prinsipnya, hal ini terlihat seperti kondisi keamanan yang kompatibel. Artinya, antar negara baik Amerika Serikat dan negara aliansinya (Jepang dan Korea Selatan) tidak pernah secara langsung akan mengancam keamanan Korea Utara, mereka hanya menginginkan agar Korea Utara berhenti untuk mengembangkan program senjata

nuklir yang dinilai sangat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Sehingga semakin lama keamanan di Semenanjung Korea menjadi lebih semakin lebih kompleks dan dilematis. (Fearon, 2017)

Tidak hanya ancaman nuklir yang diberikan oleh Korea Utara, pada tahun 2002 Korea Utara mengakui bahwa Korea Utara telah menculik beberapa warga dari Jepang dan penculikan itu terjadi antara tahun 1970-1980, dimana hanya 5 orang yang sudah kembali ke Jepang. Keluarga dari korban penculikan tersebut bahkan meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk ikut mencari informasi tentang keluarga mereka yang diculik oleh Korea Utara. (Voa, 2018)

Meghadapi ancaman dari Kim Jong Un yang semakin lama semakin lebih kompleks, Jepang mulai mengantisipasi dan berpikir untuk melawan atau bahkan berupaya untuk menangkal ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara, namun mengingat Jepang tidak memiliki militer yang sempurna mengacu pada Pasal 9 dalam Konstitusi 1947 yang menjelaskan bahwa adanya pelarangan terhadap agresi dan menolak semua kekuatan militer. Dimana pertahanan Jepang tidak memiliki unsur militeristik dan tidak diizinkan untuk membentuk militer apapun meskipun industri Jepang mampu mengembangkannya. Dengan adanya hasil dari perjanjian San Fransisco di tahun 1951 yang juga mengacu pada konstitusi 1947 otomatis Amerika Serikat memiliki kontribusi besar dalam bidang pertahanan Jepang dan menjalin aliansi bagi kedua negara.

Amerika Serikat dan Jepang akan meningkatkan kerja sama pertahanan mereka untuk menghadapi ancaman dari senjata nuklir Korea Utara. Hal ini dipicu oleh ketegangan di Asia Timur yang tetap tinggi. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis, Sekretaris Negara Rex Tillerson serta beberapa perwakilan dari Jepang yang terdiri dari Menteri Pertahanan Itsunori Onodera dan Menteri Luar Negeri Taro

Kono. Pada sebuah pertemuan yang diadakan di Washington DC mereka telah sepakat untuk bekerja lebih erat terkait ancaman dari Korea Utara. Menteri Pertahanan Jepang menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa, “Untuk ancaman dari Korea Utara, pada pertemuan ini kami sepakat untuk meningkatkan tekanan dan untuk memperkuat kemampuan aliansi.” (voa, 2017)

B. Rumusan Masalah

Dari penulisan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menemukan sebuah pokok permasalahan yaitu, **Bagaimana Upaya Jepang – Amerika Serikat dalam Menghadapi Provokasi Militer Korea Utara ?**

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Aliansi

Menurut Stephen M. Waltz (1985) dalam tulisan *Alliance Formation and the Ballance of World Power* dengan teori terkenal *ballance of power*, aliansi merupakan upaya negara bergabung dengan negara lain untuk menangkal ancaman bersama. Strategi yang aman yaitu bergabung dengan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap ancaman bersama. Dalam sebuah aliansi terdapat dua cara untuk melawan musuh yaitu melalui *balancing* dan *bandwagoning*. Dimana *Balancing* diartikan bahwa negara yang lemah melakukan aliansi dengan negara yang kuat dan berusaha untuk menyeimbangkan dengan negara yang kuat tersebut untuk melawan musuh. Sedangkan *Bandwagoning* yaitu negara yang lemah melakukan kerja sama dengan negara musuh, dengan kata lain negara lemah tersebut berteman dengan negara musuh, *bandwagoning* dianggap cara yang berbahaya karena bisa saja musuh akan merasa semakin berkuasa. (Walt, 2013)

Dalam hal ini Jepang memilih cara balancing, yaitu melakukan aliansi dengan Amerika Serikat. Alasan negara untuk melakukan balancing yaitu, jika suatu negara tidak melakukan balancing, maka negara tersebut akan mempunyai resiko untuk menerima dampak dari ancaman negara yang dianggap mengancam. Sehingga disini akan dibahas mengenai Amerika Serikat dan Jepang melakukan aliansi karena menganggap ancaman militer Korea Utara sebagai ancaman bersama. Aliansi yang dilakukan Amerika Serikat dan Jepang untuk mengimbangi kekuatan terhadap ancaman militer dari Korea Utara.

Terbentuknya aliansi AS-Jepang bermula ketika Jepang menderita kekalahan pada Perang Dunia II yang berakibat pendudukan wilayah Jepang oleh pasukan AS. Setelah berakhirnya masa pendudukan tersebut, AS berkeinginan merangkul Jepang untuk di jadikan sebagai sekutu utama dan pilar pertahanan di Asia. Berdasarkan perjanjian keamanan yang dibuat, maka AS memiliki komitmen untuk menjamin keamanan Jepang dan melindunginya dari bahaya lingkungan eksternal dalam hal ini ancaman dari agresi militer US beserta sekutunya-sekutunya yang berada di Asia seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. (FIRDAUS, 2014)

Semakin kuatnya hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang dikarenakan keadaan security dilemma di kawasan yang dibuat oleh Korea Utara. Semakin besar peningkatan militer suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran yaitu rasa tidak aman yang besar juga pada negara disekitarnya. Ketika sebuah negara merasa terancam, maka negara tersebut memiliki dua pilihan yaitu bertindak menyerang secara langsung atau bertahan (defense) dengan memperkuat militernya. Pada skripsi ini Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Jepang pada hubungan aliansi militer Amerika Serikat dengan Jepang untuk melawan peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Korea

Utara. Kekuatan aliansi yang dilakukan juga digunakan sebagai alat untuk menghalangi kekuatan dari Korea Utara.

2. Konsep Diplomasi Pertahanan

Secara sederhana suatu hubungan pertahanan (*defence relationship*) merupakan ikatan jaringan antar dua atau lebih negara melalui angkatan-angkatan bersenjata nasionalnya dan birokrasi badan penelitian, pengembangan dan industri pertahanan dan birokrasi pertahanan. Defence relationship merupakan suatu elemen atau subordinat dari hubungan keamanan (*security relationship*). Hubungan keamanan sendiri bersifat luas bukan saja mencakup keamanan tetapi juga perdagangan diplomasi, budaya dan bidang-bidang kehidupan nasional lainnya. Jika defence relationship merupakan wilayah kegiatan menteri pertahanan, departemen pertahanan dan angkatan bersenjata maka security relationship mencakup ketiga lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pertahanan tersebut juga mencakup departemen-departemen pemerintahan lainnya. (Sudarsono, 1995)

Secara garis besar, untuk mewujudkan pertahanan yang kuat, dibutuhkan upaya diplomasi yang optimal. Dalam kajian pertahanan negara, dikenal sebutan Diplomasi Pertahanan yang tujuannya adalah melakukan upaya diplomatik baik ke dalam atau pun keluar, yang menggunakan perspektif pertahanan negara. Upaya diplomatik ini bisa saja kerja sama antar negara atau pun intra negara yang melibatkan peran militer atau pun nir-militer.

Negara-negara bangsa akan membangun suatu keterhubungan pertahanan untuk berbagai alasan dan hubungan pertahanan antara negara-negara tetangga dirancang untuk tiga hal penting yaitu: menambah pendalaman kekuatan pada pertahanan bangsa dan memperbaiki keamanan regional dan global.

Konsep lain yang digunakan adalah Diplomasi Pertahanan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama pertahanan antara kedua negara. K.M. Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menjelaskan pengertian diplomasi, yaitu “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain”. (Roy, 1991)

Diplomasi merupakan proses politik damai antara negara bangsa yang mengharapkan struktur yang dapat membentuk dan mengatur hubungan sistem internasional serta mengakomodasi kepentingan suatu negara. Dan dapat dijalankan melalui beberapa jenis instrumen seperti politik, ekonomi, perdagangan, bantuan, hak asasi, kontrol militer, budaya dan peningkatan akademik/pendidikan. R.W. Sterling dalam buku *Macropolitics*, menjelaskan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Sedangkan *defense* atau pertahanan merupakan usaha penciptaan keamanan untuk menghadapi ancaman maupun serangan. Pengembangan kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara karena kondisi sistem internasional yang bersifat anarki, sehingga terjadinya serangan yang dilakukan oleh negara satu ke negara lain untuk mencapai kepentingannya menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari. Secara tradisional peran militer atau kekuatan pertahanan ditujukan untuk pertahanan negara baik melalui fungsi-fungsi penangkalan, pertahanan, intervensi militer di masa lalu yang ditujukan untuk menggagal kerjasama strategis atau aliansi atas dasar-dasar pertimbangan politik nyata dan kepentingan pertahanan nasional.

Saat ini, Diplomasi Pertahanan mencakup pertama, upaya untuk membantu membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan untuk mengembangkan apa yang disebut CBM (*Confidence Building Measures*). Kedua, Diplomasi Pertahanan juga ditujukan untuk membantu mengembangkan politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan. Ketiga, Diplomasi Pertahanan juga digunakan untuk memberikan sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia seperti misi-misi perdamaian dunia. Diplomasi Pertahanan juga bisa membentuk persepsi bersama tentang suatu masalah dan mind-set militer negara lain.

Semakin besar peningkatan militer suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran yaitu rasa tidak aman yang besar juga pada negara disekitarnya. Ketika sebuah negara merasa terancam, maka negara tersebut memiliki dua pilihan yaitu bertindak menyerang secara langsung atau bertahan (*defense*) dengan memperkuat militernya. Seperti halnya Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap Jepang melalui hubungan militer Amerika Serikat dengan Jepang untuk melawan peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara. Namun tidak cukup dengan bantuan dari Amerika Serikat saja, Jepang perlahan-lahan juga mulai membuka diri terhadap Korea Selatan, dimana Jepang juga mengajak Korea Selatan untuk ikut dalam menghadapi agresivitas militer Korea Utara. Jepang dan Korea selatan mulai untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara tersebut, sebelum pada akhirnya membentuk trilateral (Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan) untuk melawan agresivitas dari Korea Utara. Pada dasarnya jika hanya sebuah hubungan bilateral saja tidak akan cukup untuk menangkal ancaman dari Korea Utara, dimana ancaman yang semakin lama menjadi sangat kompleks dan pada kenyataannya China ternyata ikut terlibat dalam pendanaan nuklir Korea Utara. Sehingga strategi trilateral menjadi sebuah mekanisme yang efektif untuk menyatukan

Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. (Iriawan, 2017)

Pada tanggal 11 Desember 2017 militer Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan melakukan atau menggelar latihan bersama, latihan tersebut dilakukan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya dengan tujuan melacak rudal Korea Utara. Latihan bersama tersebut dilakukan kurang lebih selama dua hari, dan dilakukan di Perairan dekat Semenanjung Korea dan Jepang. Dimana pada latihan tersebut melibatkan 12.000 tentara militer Amerika Serikat yang bermarkas di Angkatan Udara Korea Selatan. (Yasinta, Kompas.com, 2017)

Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat di dalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara atau lebih. Di dalam rumus-rumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik. Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. (Multazam, 2010)

Maka adanya konsep pertahanan mampu menjadi landasan bagi Jepang dan juga Amerika Serikat bahkan Korea Selatan yang ikut terlibat dalam kerja sama untuk melawan agresivitas militer Korea Utara, serta menangkalkan ancaman – ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara.

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan konsep yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut, Upaya

Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi provokasi militer Korea Utara yaitu :

- a. Jepang dan Amerika Serikat semakin memperkuat aliansi militernya untuk menekan provokasi miter dari Korea Utara.
- b. Membangun kerja sama Trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research) yaitu dengan menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, mediamassa, data-data dari website, serta dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dan mendukung permasalahan yang ada. Teknis analisis data yang digunakan yaitu teknik eksplanatif. Disamping itu dalam skripsi ini juga menggunakan metode kualitatif, yakni penggunaan teori sebagai landasan analisa untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan kerja sama Jepang – Amerika Serikat dalam menghadapi agresivitas militer Korea Utara.
2. Menguji hipotesa yang telah dijabarkan dalam menjawab rumusan masalah diatas.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup dan waktu. Pembatasan tersebut bertujuan agar memfokuskan pada upaya - upaya aliansi Jepang – Amerika Serikat dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer Korea Utara. Seperti beberapa waktu yang lalu Korea Utara

melakukan uji coba nuklir dan uji coba yang dilakukan tersebut melalui wilayah Jepang. Pemerintah Jepang bahkan menghimbau kepada masyarakatnya untuk mencari perlindungan, sehingga hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu ancaman bagi Jepang. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan dan memaparkan sedikit masalah diluar batasan tersebut untuk lebih mendukung penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Bab 1: Merupakan Bab pendahuluan yang didalamnya terdapat unsur-unsur metodologis karya ilmiah yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Peneliatian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab 2: Dalam bab ini dijabarkan lebih lanjut tentang awal mula terjalannya kerja sama militer antara Jepang dan Amerika Serikat dan ancaman – ancaman yang yang mungkin saja dilakukan oleh Korea Utara (seperti ancamana uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, melewati wilayah Jepang)

Bab 3: Dalam bab ini akan dibahas tentang upaya - upaya peningkatan kerja sama antara Jepang – Amerika Serikat dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer Korea Utara.

Bab 4: Merupakan bab kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya.